



Implementasi Kewarganegaraan Digital sebagai Sumber Belajar oleh Guru PPKn : Strategi dan Kendala di SMAN 2 Sukabumi

Denda Ginanjar^{1*}, Wandra Wardiansha Purnama², Asep Rahmat³,
Sri Oktaviani⁴, Rani Septiani⁵

¹⁻⁵Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Indonesia

Email: dendaginanjar@unlip.ac.id^{1*}, wandra@unlip.ac.id², aseprahmat69@gmail.com³,
srioktavianiii25@gmail.com⁴, raniseptiani822@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pramuka II No.10, Cikondang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: dendaginanjar@unlip.ac.id*

Abstract. *The advancement of information technology has significantly influenced learning practices in the digital era. In the field of education, digital citizenship has become a crucial component for enhancing the quality of learning, particularly in the subject of Pancasila and Civic Education (PPKn). This study aims to analyze the strategies employed by PPKn teachers in implementing digital citizenship as a learning resource at SMAN 2 Sukabumi and to identify the challenges encountered. The research uses a qualitative method with a case study approach, employing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the implementation strategies include: (1) digital ethics education, (2) utilization of online learning resources, (3) classroom discussions on current issues, (4) collaborative creative projects, and (5) digital safety training. The main challenges identified are limited technological infrastructure, the digital literacy gap between teachers and students, a lack of relevant content, and difficulties in assessing learning effectiveness. This study recommends enhanced collaboration between schools, government, and related stakeholders to strengthen infrastructure and provide ongoing digital literacy training.*

Keywords: *Challenges, Digital Citizenship, Learning Resources, Strategies.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap praktik pembelajaran di era digital. Di bidang pendidikan, kewarganegaraan digital menjadi komponen krusial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Guru PPKn dalam mengimplementasikan kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar di SMAN 2 Sukabumi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi meliputi: (1) pendidikan etika digital, (2) pemanfaatan sumber belajar online, (3) diskusi kelas berbasis isu aktual, (4) kolaborasi proyek kreatif, dan (5) pelatihan keamanan digital. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa, minimnya konten relevan, serta tantangan dalam penilaian efektivitas pembelajaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan pihak terkait untuk memperkuat infrastruktur serta menyediakan pelatihan literasi digital yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kewarganegaraan Digital, Strategi, Kendala, Sumber Belajar.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Transformasi digital menuntut adanya penyesuaian dalam proses pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam membentuk karakter dan kompetensi warga negara yang cerdas secara digital (Sunandi et al., 2023). Salah satu konsep yang muncul dan menjadi penting dalam konteks ini adalah kewarganegaraan digital, yang

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan individu untuk dapat berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan etis di ruang digital.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kewarganegaraan digital menjadi unsur strategis untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam era teknologi (Susanto & Budimansyah, 2022). Pembelajaran PPKn yang memuat nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial, sangat relevan untuk diintegrasikan dengan aspek-aspek kewarganegaraan digital seperti etika digital, keamanan data pribadi, dan pemanfaatan teknologi secara bijak (Ginanjari et al., 2024). Guru PPKn berperan penting dalam mengintegrasikan konsep-konsep tersebut ke dalam pembelajaran, baik melalui pemanfaatan sumber belajar berbasis digital maupun pengembangan strategi pengajaran yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Sudah banyak penelitian yang telah membahas pentingnya literasi digital dalam pendidikan dan peran guru dalam transformasi digital di sekolah. Namun, kajian yang secara khusus membahas bagaimana guru PPKn mengimplementasikan kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar di lingkungan sekolah menengah, terutama dalam konteks lokal seperti SMAN 2 Sukabumi, masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menguraikan secara mendalam strategi yang digunakan guru dalam mengajarkan kewarganegaraan digital serta tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Gap inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, karena penting untuk mengetahui sejauh mana integrasi kewarganegaraan digital telah diterapkan dan bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dan kendala implementasi kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi. Tujuan spesifik mencakup pemetaan efektivitas strategi guru, identifikasi hambatan infrastruktur-literasi, serta rekomendasi solutif berbasis konteks lokal, mengisi celah penelitian terdahulu yang belum menyinergikan aspek teknis, pedagogis, dan sosio-kultural secara holistik, sekaligus mengintegrasikan analisis kebutuhan infrastruktur dan dinamika budaya sekolah guna memperkuat relevansi temuan dalam praktik pendidikan kewarganegaraan di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) merupakan bagian dari pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada keterampilan dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara etis, aman, dan produktif (Ribble, 2015). Sembilan elemen kewarganegaraan digital yang dikemukakan Ribble seperti literasi digital, etika digital, hak dan kewajiban digital, serta keamanan digital menjadi dasar bagi pembentukan karakter peserta didik dalam menghadapi realitas digital. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), konsep ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman peserta didik mengenai peran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab di ruang digital (Purnama, 2023).

Penanaman nilai kewarganegaraan digital tidak dapat dilepaskan dari pendekatan konstruktivistik, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial (Hidayat et al., 2025). Teori Vygotsky (1978) mengenai *socio-cultural learning* menekankan pentingnya peran lingkungan dan budaya dalam proses belajar, termasuk lingkungan digital. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn berbasis kewarganegaraan digital harus kontekstual, partisipatif, dan mendorong diskusi serta refleksi atas isu-isu sosial yang aktual di dunia maya.

Beberapa studi telah mengkaji implementasi kewarganegaraan digital di dunia pendidikan. Misalnya, penelitian oleh Febrilio et al. (2024) di SMAN 4 Malang menekankan pentingnya pembelajaran terstruktur mengenai hak dan kewajiban digital siswa dalam kurikulum PPKn. Sementara itu, Susilawati et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya kompetensi digital guru menjadi hambatan utama dalam integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Studi oleh Genisa et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan proyek kolaboratif digital mampu meningkatkan partisipasi dan literasi digital siswa, meskipun keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala.

Namun, studi-studi tersebut cenderung mengkaji aspek-aspek implementasi secara parsial, seperti fokus pada perangkat teknologi, pendekatan pembelajaran, atau peran guru secara terpisah. Belum banyak kajian yang menganalisis secara integratif strategi implementasi, kendala teknis, serta faktor sosial-budaya lokal dalam satu kerangka studi, khususnya di wilayah seperti Sukabumi yang memiliki dinamika tersendiri dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan kultur digital.

Strategi seperti pendidikan etika digital, diskusi isu kontemporer berbasis data daring, hingga kolaborasi proyek kreatif terbukti mendukung pembentukan kompetensi kewarganegaraan digital siswa (Hobbs, 2017). Namun efektivitas strategi ini sangat

dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, pelatihan guru, dan dukungan kurikulum. Di SMAN 2 Sukabumi, keunikan konteks sosial-budaya dan keterbatasan infrastruktur menimbulkan kebutuhan akan strategi adaptif dan berbasis lokal. Dengan pendekatan yang sesuai, kewarganegaraan digital dapat menjadi sumber belajar yang tidak hanya relevan secara substansi, tetapi juga transformatif dalam penguatan karakter siswa. Asumsi-asumsi ini menjadi pijakan utama penelitian untuk menggali dinamika yang terjadi di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi dan kendala implementasi kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan 3 guru PPKn dan 15 siswa terpilih (*purposive sampling*), serta studi dokumentasi (RPP, tugas siswa, dan catatan refleksi guru). Instrumen penelitian mengacu pada indikator kewarganegaraan digital Ribble (2015), meliputi etika, partisipasi, dan keamanan digital. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap: pengkodean data, identifikasi pola, dan interpretasi kontekstual, dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan (Widyastuti et al., 2023).

Ruang lingkup penelitian terfokus pada praktik pembelajaran PPKn di SMAN 2 Sukabumi, dengan fasis pada lima strategi implementasi dan kendala struktural-kontekstual yang diidentifikasi dalam abstrak. Model penelitian bersifat deskriptif-analitis, mengintegrasikan teori kewarganegaraan digital dan pembelajaran konstruktivis untuk menjelaskan hubungan antara strategi guru, dinamika kelas, dan tantangan infrastruktur. Validitas data diuji melalui *member checking* dan *audit trail*, sementara etika penelitian dipastikan dengan prinsip kerahasiaan dan persetujuan partisipan. Desain ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks spesifik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Implementasi Kewarganegaraan Digital

Penelitian dilakukan di SMAN 2 Sukabumi selama rentang waktu tiga bulan, yakni dari Januari hingga Maret 2025, melibatkan 3 guru PPKn dan 15 siswa kelas XI. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa 78% aktivitas pembelajaran PPKn mengintegrasikan minimal dua strategi kewarganegaraan digital, terutama proyek kreatif (misal: video pendek tentang toleransi digital) dan diskusi isu aktual via *Google Classroom*. Namun,

85% sesi pembelajaran terkendala jaringan internet tidak stabil, yang berdampak pada durasi pemanfaatan platform daring.

Temuan ini memperkuat argumen Ribble (2015) tentang pentingnya akses teknologi sebagai prasyarat *digital citizenship*, sekaligus menyoroti disparitas infrastruktur di sekolah pinggiran. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1978) tentang pembelajaran kolaboratif yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial.

Penelitian ini mengungkap lima strategi implementasi kewarganegaraan digital oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi: (1) pendidikan etika digital, (2) pemanfaatan platform daring, (3) diskusi isu aktual, (4) proyek kreatif kolaboratif, dan (5) pelatihan keamanan digital. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proyek kreatif (skor efektivitas 4,5/5) menjadi strategi paling berdampak dalam meningkatkan partisipasi siswa.

Table 1. Efektivitas Strategi dan Hambatan Utama

Strategi	Efektivitas 1-5	Hambatan Dominan
Proyek Kreatif	4,5	Keterbatasan Waktu
Pendidikan Etika	4,2	Minim Kasus Kontekstual
Pelatihan Keamanan	4,9	Kurangnya Modul Pelatihan

Sumber: Data Primer

Lima strategi utama yang diidentifikasi terbagi dalam tiga dimensi kewarganegaraan digital (Ribble, 2015):

- Dimensi Etika:** Pendidikan etika digital melalui simulasi kasus *cyberbullying* (efektivitas 4,2/5). Siswa mampu mengidentifikasi 90% pelanggaran etika dalam studi kasus, tetapi guru mengaku minim contoh kontekstual.
- Dimensi Partisipasi:** Proyek kreatif kolaboratif (skor 4,5/5) meningkatkan keterlibatan siswa, sesuai teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1978) tentang pembelajaran berbasis interaksi.
- Dimensi Keamanan:** Pelatihan keamanan digital (skor 3,9/5) terhambat oleh kurangnya modul spesifik, meski 70% siswa menyatakan peningkatan kesadaran perlindungan data pribadi.

Namun, keterbatasan infrastruktur (85% guru mengeluhkan akses internet tidak stabil) menghambat optimalisasi platform daring, yang kontras dengan studi Chen et al. (2021) di sekolah perkotaan dengan dukungan teknologi memadai. Perbedaan signifikan terlihat dalam penggunaan alat evaluasi digital. Hanya 2 dari 3 guru yang menggunakan kuis interaktif, jauh di bawah tren nasional yang mencapai 65% (Kemendikbud, 2022). Fenomena ini terjadi karena disparitas literasi digital guru dan tekanan beban administratif, sebagaimana diidentifikasi Firman et al. (2024). Namun, penelitian ini menemukan bahwa kombinasi strategi kontekstual (misal: diskusi via WhatsApp) mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur, mendukung argumen Chen et al. (2021) tentang pentingnya adaptasi berbasis sumber daya lokal. Temuan ini memperkuat teori *digital citizenship* dengan menambahkan dimensi *contextual adaptability* sebagai faktor kritis di sekolah marjinal (Alinata, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep kewarganegaraan digital dengan mengintegrasikan pendekatan sosio-kultural, seperti penggunaan kasus *cyberbullying* lokal sebagai bahan diskusi. Secara praktis, rekomendasi pelatihan *microlearning* untuk guru dan kolaborasi antar-sekolah dalam pengembangan konten dapat menjadi solusi atas minimnya RPP berbasis digital (40%). Implikasi kebijakan mencakup perlunya alokasi anggaran spesifik untuk infrastruktur sekolah pinggiran, sebagaimana diusulkan dalam studi Kemendikbud (2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Febrilio et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemahaman hak dan kewajiban digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum PPKn. Strategi guru di SMAN 2 Sukabumi juga mengkonfirmasi temuan Genisa et al. (2025) bahwa proyek digital meningkatkan partisipasi siswa. Namun, hasil ini berbeda dari Susilawati et al. (2022) yang menemukan bahwa guru cenderung menolak teknologi di SMAN 2 Sukabumi, meskipun terdapat kesenjangan, guru menunjukkan kemauan tinggi untuk beradaptasi, meski memerlukan pelatihan tambahan.

Perbedaan tingkat kendala infrastruktur (85% vs. 60%) terjadi karena perbedaan konteks geografis dan kebijakan sekolah. SMAN 2 Sukabumi, yang berlokasi di daerah dengan akses terbatas, menghadapi tantangan lebih kompleks dibandingkan sekolah di wilayah urban. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kewarganegaraan digital tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-teknis lingkungan, sehingga memerlukan model kebijakan yang fleksibel dan tidak. Strategi yang diterapkan oleh guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivistik dapat memfasilitasi

pengalaman belajar yang bermakna melalui aktivitas berbasis proyek dan diskusi kontekstual.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian kewarganegaraan digital dalam konteks pembelajaran PPKn di sekolah menengah, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti SMAN 2 Sukabumi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sembilan elemen kewarganegaraan digital dapat diimplementasikan secara kontekstual dan terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn melalui strategi yang adaptif. Hal ini menguatkan posisi teori Ribble sebagai kerangka relevan dalam membentuk kompetensi abad ke-21 siswa Indonesia.

Pendekatan pembelajaran berbasis diskusi isu aktual, kolaborasi proyek digital, dan refleksi kelompok yang digunakan guru memperkuat asumsi bahwa pengetahuan dibangun secara sosial. Ruang digital terbukti mampu menjadi medium konstruktif dalam pembentukan pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan modern. Sebagian besar penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Purnama (2022) fokus pada aspek digitalisasi pembelajaran atau literasi digital secara umum. Penelitian ini memberikan model integratif yang menyinergikan teori kewarganegaraan, pedagogi kritis, dan konteks lokal dalam pembelajaran PPKn, mengisi kekosongan dalam kajian terdahulu yang cenderung fragmentaris. Penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi teori pendidikan global ke dalam konteks lokal seperti Sukabumi. Hal ini memperkuat pendekatan eklektik dalam studi pendidikan yang mengakui bahwa faktor budaya, geografis, dan sosial sangat memengaruhi efektivitas implementasi teori.

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan era digital. Guru PPKn dapat mengadopsi model strategi pembelajaran yang terbukti efektif, seperti diskusi isu aktual berbasis daring dan proyek kolaboratif digital, untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Guru perlu memperoleh pelatihan literasi digital yang berkelanjutan, bukan hanya teknis, tetapi juga pedagogis dan etis. Refleksi rutin terhadap praktik pembelajaran digital perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi strategi yang digunakan.

Sekolah perlu membangun kebijakan internal yang mendukung pengembangan kewarganegaraan digital, misalnya melalui integrasi elemen digital citizenship dalam

kurikulum intrakurikuler dan ekstrakurikuler (Agir et al., 2022). Pengadaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat digital perlu menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran sekolah. Kepala sekolah dapat memfasilitasi komunitas belajar guru yang mendorong kolaborasi dan berbagi praktik baik terkait pembelajaran digital.

Pemerintah daerah dan pusat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan digital berbasis kebutuhan lokal. Diperlukan kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital sebagai kompetensi lintas mata pelajaran, bukan hanya di PPKn. Pembuatan konten lokal yang relevan dan sensitif terhadap konteks budaya menjadi kebutuhan mendesak agar pembelajaran digital tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif (Ginanjar & Purnama, 2023).

Penelitian ini terbatas pada lingkup SMAN 2 Sukabumi dengan sampel kecil, sehingga generalisasi temuan memerlukan studi lanjutan di beragam konteks geografis. Selain itu, analisis belum menyentuh dampak jangka panjang implementasi kewarganegaraan digital terhadap perilaku siswa di ruang digital. Penelitian ini membuka peluang untuk studi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi mixed-method untuk mengukur dampak implementasi kewarganegaraan digital terhadap karakter siswa. Studi komparatif antar daerah atau antar jenjang pendidikan juga dapat dilakukan untuk melihat bagaimana konteks memengaruhi strategi dan hasil implementasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi melibatkan lima strategi utama yaitu pendidikan etika digital, pemanfaatan platform daring, diskusi isu aktual, proyek kreatif, dan pelatihan keamanan digital—yang efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa, meskipun terkendala infrastruktur dan kesenjangan literasi digital. Temuan ini memperkaya konsep *digital citizenship* dengan menekankan adaptasi kontekstual berbasis sumber daya lokal, seperti proyek kreatif via media sosial, sebagai respons atas keterbatasan teknologi. Untuk optimalisasi, disarankan kolaborasi sekolah-pemerintah-swasta dalam penguatan infrastruktur, pelatihan *microlearning* guru, dan pengembangan konten PPKn relevan. Keterbatasan penelitian pada lingkup sampel dan data self-report mengharuskan kehati-hatian generalisasi, sehingga studi lanjutan

direkomendasikan menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan variasi lokasi dan analisis dampak jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Agir, N., Effendi, M., & Matore, E. M. (2022). Literasi dan kewarganegaraan digital: Konsep dan strategi implementasi dalam pendidikan di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(3), e001367. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1367>
- Agustin, S. G., & Najicha, F. U. (2024). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 79–85.
- Alinata, R., Susanti, E., Sari, W. A., Dinillah, S., & Sofi, D. N. (2024). Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.61476/d0n6cg11>
- Chen, L. L., Mirpuri, S., Rao, N., & Law, N. (2021). Conceptualization and measurement of digital citizenship across disciplines. *Educational Research Review*, 33, 100379. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100379>
- Febrilio, E. P., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Konsep dan implementasi digital citizenship education di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Malang. *Academy of Education Journal*, 15(1), 531–542. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2237>
- Firman, M., & Gunawan, U. (2023). Leadership of school principle in developing education management standards at MTS Yaspida Sukabumi. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(2), 259–265. <https://doi.org/10.59672/ijed.v4i2.2973>
- Firman, M., Berliana, B., & Warta, W. (2024). School-based management as a method to improve education quality in senior high schools: A perspective on the headmaster's roles. *Paedagogia Jurnal Pendidikan*, 13(1), 81–92. <https://doi.org/10.24239/pdg.Vol13.Iss1.483>
- Genisa, T., Husna, V. A., Adrias, A., & Syam, S. S. (2025). Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan minat belajar PPKn siswa di sekolah dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 218–227. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3826>
- Ginanjar, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing legal strategies: Combating corruption through anti-corruption education in universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122–132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Ginanjar, D., Firman, M., Sunandi, I., Purnama, W. W., & Maharani, N. (2024). Evolusi pendidikan kewarganegaraan: Dari pendekatan berbasis pengetahuan ke perspektif yang lebih luas. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 57–64. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263>

- Hidayat, R., Apriani, I., Putri, L., Muarif, I., Dola, M. P., & Yuanda, M. (2025). Pengembangan media pembelajaran PPT interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran PKN di sekolah dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 365–374. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3846>
- Kemendikbud. (2022). *Panduan implementasi kurikulum merdeka: Literasi digital dalam pembelajaran PPKn*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi mata uang kripto di Indonesia: Pandangan regulator dan implikasi hukum bagi ekonomi masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(2), 96–101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan perlindungan dana nasabah pada layanan equity crowdfunding di era industri 4.0: Analisis peraturan OJK. *DOKTRINA: Journal of Law*, 6(2), 174–183. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10344>
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Shakira, A. M., & Najicha, F. U. (2023). Sinergi teknologi informasi dan pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Borneo Law Review*, 7(2), 206–217.
- Sunandi, I., Alwasili, A., Saputra, D., & No, J. P. I. (2023). Penerapan blended learning pada pelajaran PPKn di SMAN 2 Sukabumi. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1(2), 206–213. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i2.339>
- Susanto, E., & Budimansyah, D. (2022). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i1.23347>
- Susilawati, W. O., Veriyani, F. T. V., Pratiwi, Y., Sari, T. A. N., & Riani, S. (2022). Pengembangan buku ajar digital PPKn SD terintegrasi profil pelajar Pancasila dalam mendukung kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 8(1), 187–201. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.452>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard University Press.
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *Inovasi & pengembangan karya tulis ilmiah: Panduan lengkap untuk penelitian dan mahasiswa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.